



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROFIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

"JUM'AT IMPIAN"

(Izin Mendatangi Nelayan)



TAHUN 2024

RINGKASAN INOVASI

1. **Nama Inovasi** : Jum'at Impian (Izin Mendatangi Nelayan)
2. **Inisiator Inovasi** : Kadis DPMPTSP
3. **Tahapan Inovasi** : Penerapan
4. **Jenis inovasi** : Digital
5. **Bentuk Inovasi** : Pelayanan Publik
6. **Urusan Inovasi** : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. **Rancang Bangun dan pokok perubahan yang dilakukan :**

Inovasi Izin Mendatangi Nelayan (JUM'AT IMPIAN) merupakan inovasi Pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Natuna, yang bertujuan membantu pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dalam pemanfaatan IT untuk pengurusan perizinan berusaha dengan mudah, cepat, gratis dan dapat diakses dimana saja. Sehingga kedepannya secara mandiri masyarakat Khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) dapat memenuhi perizinan berusahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inovasi Jum'at Impian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inovasi "Jum'at Impian" merupakan bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya sektor perikanan (nelayan) dengan tim kerja pada hari Jum'at secara berkala akan mendatangi lokasi kelompok nelayan berdasarkan hasil identifikasi dari data yang di dapat dari (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna.
- b. Tim kerja akan dibentuk sampai tingkat kecamatan dan desa
- c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan Jum'at Impian di lapangan.
- d. Tim kerja akan memberikan pelayanan pendampingan, penjelasan data apa saja yang di input ke dalam sistem OSS, kemudian selanjutnya membantu pelaku usaha (nelayan) melakukan penginputan data sampai dengan selesai dan terbitnya perizinan berusaha (NIB) atau pelaku usaha (nelayan) dapat secara mandiri dalam hal penginputan data di dalam sistem OSS. Sistem OSS dapat diakses kapanpun dan dimana saja, sehingga pelaku usaha (nelayan) akan dimudahkan dalam pengurusan izin usahanya.

- e. Sistem OSS langsung menerbitkan perizinan dengan mudah, cepat dan gratis tentunya.
- f. Masyarakat dapat mencetak langsung perizinan berusahnya sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran rancang bangun inovasi ini adalah :

- a. Tim kerja bekerjasama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna untuk mendapatkan data nelayan yang ada di seluruh Kabupaten Natuna berdasarkan masing-masing kelompok nelayan yang sudah dibentuk;
- b. Tim Kerja melakukan identifikasi data pelaku usaha berdasarkan data dari HNSI;
- c. Tim kerja yang sudah dibentuk, menyiapkan dokumen dan sarana yg dibutuhkan untuk datang ke lokasi pelaku usaha (nelayan).
- d. Pelaku usaha (nelayan) menerima kedatangan tim kerja untuk membantu pelayanan perizinan yang dibutuhkan
- e. Tim kerja akan memberikan pelayanan pendampingan, penjelasan data apa saja yang di input ke dalam sistem OSS, kemudian selanjutnya membantu pelaku usaha (nelayan) melakukan penginputan data sampai dengan selesai dan terbitnya perizinan berusaha (NIB) atau pelaku usaha (nelayan) dapat secara mandiri dalam hal penginputan data di dalam sistem OSS.
- f. Pengentryan data yang benar dan lengkap akan langsung diproses oleh system OSS, dan perizinan berusaha terbit langsung bisa dicetak.

Dengan Inovasi Jum'at Impian, DPMPSTSP siap menurunkan timnya mendatangi pelaku usaha (nelayan) untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap, membantu pelaku usaha (nelayan)menginput data ke dalam sistem OSS, sampai terbit perizinan berusaha. Atau pelaku usaha (nelayan) dapat mengajukan permohonannya secara mandiri didalam sistem OSS dengan didampingi Tim, sehingga kedepannya diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku usaha (nelayan) yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan berusaha.

Kemandirian pelaku usaha (nelayan) dalam memenuhi dokumen penting untuk memperoleh identitas resmi dan legalitas usaha dapat memastikan bahwa semua kegiatan operasional mereka terlindungi dan diakui oleh hukum, memudahkan akses ke fasilitas dan layanan pemerintah

serta membuka lebih banyak peluang bisnis, merupakan target perubahan dari inovasi Jum'at Impian. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha (nelayan) sadar pentingnya dokumen perizinan untuk suatu kegiatan usaha.

Waktu uji coba inovasi : 01 April 2024

Waktu implementasi Inovasi : 01 Juni 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Inovasi sistem digital OSS pada bidang pelayanan publik adalah sistem yang mengintegrasikan semua pelayanan perizinan usaha yang menjadi kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan melalui elektronik. Inovasi telah mengungguli kompetitif yang penting karena memberi jalan bagi organisasi untuk memberikan layanan yang berbeda, inovasi menjadi hal yang penting dalam ranah pengembangan teknologi digital. Inovasi merupakan pengembangan produk baru dan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan. Inovasi melalui sistem digital merupakan upaya untuk meningkatkan digital literacy masyarakat yang sekaligus berimplikasi positif dalam peningkatan penggunaan pelayanan daring yang disediakan.

Penggunaan teknologi sistem digital adalah sebuah alternatif untuk melakukan inovasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, karena kecenderungan perkembangan masyarakat dan perekonomiannya semakin berkembang oleh inovasi teknologi. Peraturan Kementerian pada tahun 2014 Nomor 30 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan ANRB menerapkan kebijakan Inovasi Pelayanan Publik semua instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang harap dapat membuat suatu inovasi terhadap cara kerja pelayanan publik. Pelaksanaan OSS diterbitkan untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung perkembangan usaha. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 139.892,16 Km² perairan (lautan) dan 2.009,04 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. memiliki laut hampir 99,24 % dari total luas wilayahnya sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan pada sektor perikanan. Untuk itu Masyarakat Kabupaten Natuna sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Dibalik tangkapan yang berlimpah, terdapat kompleksitas regulasi dan dokumen legal yang perlu dipahami dan di patuhi agar usaha mereka dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.

Mengingat Kabupaten Natuna merupakan kabupaten dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, dengan rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota

kabupaten menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada Pelaku Usaha (nelayan). Sarana transportasi yang terbatas dengan waktu, menjadikan biaya yang harus dikeluarkan Pelaku usaha (nelayan) cukup tinggi apabila akan pergi ke ibukota kabupaten dalam mengurus perizinan usahanya. Jarak setiap kecamatan ke ibukota bervariasi, yang paling jauh adalah Kecamatan Pulau Panjang, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dengan sarana transportasi yang terbatas, baik dari sisi waktu maupun jumlah transportasi tersebut. Sedangkan jarak yang paling dekat adalah Kecamatan Bunguran Timur sebagai kecamatan tempat ibukota kabupaten berada.

Hal tersebut menjadi kendala bagi pelaku usaha (nelayan) untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, khususnya pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Natuna dirasakan belum maksimal dalam memberikan pelayanan, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin, hal ini menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan). Berikut data nelayan setiap kecamatan yang menjadi sasaran pelayanan perizinan.

Tabel 1. Data Jumlah Rumah Tangga (RTP) nelayan Tangkap dan nelayan Perikanan Budidaya setiap kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RTP) Penangkapan	Jumlah Rumah Tangga (RTP) Perikanan Budidaya	Jumlah
1	Bunguran Barat	784	132	916
2	Bunguran Selatan	747	20	767
3	Bunguran Tengah	0	67	67
4	Bunguran Timur	697	83	780
5	Bunguran Timur Laut	644	39	683
6	Bunguran Utara	281	34	315
7	Midai	174	0	174
8	Pulau Laut	342	20	362
9	Pulau Tiga	337	36	373
10.	Pulau Tiga Barat	131	33	164
11	Serasan	592	35	627
12	Serasan Timur	271	21	292
13	Subi	344	30	374
14	Suak Midai	82	0	82
15	Bunguran Batubl	254	37	291
16.	Pulau Panjang	90	15	105
17.	Seluan	79	16	95
Jumlah				6467

Sumber : Data Perikanan Tahun 2023

Tabel 2. Data Kelompok Nelayan di masing-masing Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis kelompok	Bidang Usaha kelompok	Jumlah
1	Bunguran Barat	KUB	Penangkapan	4
		Pokdakan	Budidaya	5
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	2
2	Bunguran Selatan	KUB	Penangkapan	5
		Pokdakan	Budidaya	1
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	2
3	Bunguran Tengah	KUB	Penangkapan	0
		Pokdakan	Budidaya	7
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	1
4	Bunguran Timur	KUB	Penangkapan	6
		Pokdakan	Budidaya	6
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	3
5	Bunguran Timur Laut	KUB	Penangkapan	12
		Pokdakan	Budidaya	3
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	3
6	Bunguran Utara	KUB	Penangkapan	2
		Pokdakan	Budidaya	1
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	1
7	Midai	KUB	Penangkapan	10
		Pokdakan	Budidaya	0
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	0
8	Pulau Laut	KUB	Penangkapan	8
		Pokdakan	Budidaya	1
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	3
9	Pulau Tiga	KUB	Penangkapan	4
		Pokdakan	Budidaya	24
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	3
10.	Pulau Tiga Barat	KUB	Penangkapan	5
		Pokdakan	Budidaya	20
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	2
11	Serasan	KUB	Penangkapan	7
		Pokdakan	Budidaya	6
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	2
12	Serasan Timur	KUB	Penangkapan	4
		Pokdakan	Budidaya	2
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	3

13	Subi	KUB	Penangkapan	11
		Pokdakan	Budidaya	2
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	0
14	Suak Midai	KUB	Penangkapan	0
		Pokdakan	Budidaya	0
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	0
15	Bunguran Batubl	KUB	Penangkapan	4
		Pokdakan	Budidaya	4
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	0
16.	Pulau Panjang	KUB	Penangkapan	0
		Pokdakan	Budidaya	0
		Poklahsar	Pengolah/pemasaran	0

Data Perikanan Tahun 2024

Berlatar belakang harapan keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan) yang ada di Kabupaten Natuna untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- Wilayah yang terdiri dari kepulauan, rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten.
- Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha (nelayan) untuk ke ibukota kabupaten
- Kurangnya pemahaman para Pelaku usaha (nelayan) terkait pentingnya legalitas suatu usaha.

Masih rendahnya masyarakat dalam pemanfaatan IT untuk memenuhi kebutuhan administrasi kenegaraannya yang lebih efektif dan efisien, seperti kebutuhan pelayanan perizinan. Kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha (nelayan) tersebut menjadi tantangan bagi DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanannya kepada pelaku usaha (nelayan), sejalan dengan konsep percepatan dan kemudahan layanan serta melakukan sinergitas dan integritas sistem penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kabupaten Natuna, maka lahirlah inovasi JUM'AT IMPIAN (Izin mendatangi nelayan) dengan harapan dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha (nelayan) dan meningkatkan kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan izin usahanya dengan memanfaatkan perkembangan Informasi dan Teknologi.

“JUM'AT IMPIAN” (Izin Mendatangi Nelayan) memiliki makna :

Pada hari Jum'at , izin Mendatangi Nelayan

Mengapa hari jum'at? Karena pada hari jum'atlah para nelayan beraktifitas didarat sementara menunggu ibada sholat jum'at. Maka kesempatan ini digunakan oleh pelayanan DPMPTSP untuk membantu pelayanan prima dengan cara mendatangi

kelompok nelayan, yang sebelumnya sudah teridentifikasi masih memerlukan bantuan perizinan untuk penerbitan izin.

Dasar inovasi dalam pembuatan inovasi pelayanan perizinan melalui JUM'AT IMPIAN yaitu adanya keluhan dan tuntutan serta harapan dari pelaku usaha (nelayan) yang menginginkan sebuah proses pelayanan perizinan yang dilakukan dengan cepat, mudah dan murah serta adanya tuntutan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Natuna yang menginginkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melakukan perkembangan kinerja dalam memberikan pelayanan menjadi lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dasar hukum inovasi pelayanan publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kemudian sebagai petunjuk teknis dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Inovasi pelayanan publik "JUM'AT IMPIAN" yang dilakukan DPMPTSP diharapkan dapat memberikan solusi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum menuju masyarakat yang mandiri. Adapun tujuan dari inovasi pelayanan JUM'AT IMPIAN ini bagi pelaku usaha / masyarakat adalah :

- a. Memberikan respon yang cepat terhadap pelayanan yang dibutuhkan khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan)
- b. Memudahkan dalam mengakses pelayanan perizinan
- c. Memberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima

Adapun manfaat dari inovasi pelayanan JUM'AT IMPIAN ditengah perkembangan teknologi informasi adalah :

- a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan)
- b. Memberikan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi pelaku usaha (nelayan)
- c. Memberikan pelayanan informasi secara intens
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha (nelayan)
- e. Menumbuhkan kemandirian pelaku usaha (nelayan)

BAB II METODOLOGI

2.1. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi JUM'AT IMPIAN merupakan inovasi Pelayanan publik pada DPMPSTSP Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha (nelayan) mendapatkan dokumen perizinan berusaha yang dibutuhkan untuk kegiatan usahanya secara legal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta pentingnya menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan izin usahanya, dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan IT. Bentuk kegiatan JUM'AT IMPIAN ini sebagai pelayanan terhadap pelaku usaha (nelayan), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Inovasi "JUM'AT IMPIAN" merupakan bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat khususnya sektor perikanan (nelayan) dengan tim kerja pada hari Jum'at secara berkala akan mendatangi lokasi kelompok nelayan berdasarkan hasil identifikasi data nelayan yang di dapat dari Dinas Perikanan dan (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna.
- b. Tim kerja akan dibentuk sampai tingkat kecamatan dan desa sehingga pelaku usaha (nelayan) yang jauh dari ibukota kabupaten dengan cepat dan mudah mendapatkan pelayanan perizinan di daerahnya masing-masing;
- c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan JUM'AT IMPIAN di lapangan.
- d. Tim kerja akan memberikan pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi ataupun layanan lainnya yang diperlukan, kemudian selanjutnya tim bisa membantu menginput data pelaku usaha (nelayan) sesuai pertanyaan yang ada disistem, atau pelaku usaha (nelayan) dapat melakukan penginputan data secara mandiri
- e. Pengisian yang benar maka Aplikasi langsung menerbitkan izin usahanya
- f. Pelaku Usaha dapat mencetak langsung izin usaha tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN INOVASI

3.1. IMPLEMENTASI LANGKAH /TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Inovasi “JUM’AT IMPIAN” merupakan bentuk inovasi yang memberikan bantuan pelayanan dan pendampingan dalam penginputkan data ke dalam aplikasi. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang akan dibentuk sampai tingkat kecamatan dan desa bahkan dapat bermitra dengan pihak lain dalam pelaksanaan inovasi;
- b. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan, desa/kelurahan, Ketua HNSI Kabupaten Natuna, Masing-masing Kelompok Nelayan yang ada di setiap kecamatan baik melalui media elektronik maupun non elektronik;
- c. Tim Kerja JUM’AT IMPIAN melakukan identifikasi data pelaku usaha (nelayan) di setiap kecamatan yang didapat baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan maupun dari HNSI Kabupaten Natuna;
- d. Tim kerja JUM’AT IMPIAN pada hari jum’at secara berkala akan mendatangi langsung kelompok-kelompok nelayan untuk mendapatkan perizinan dengan Inovasi JUM’AT IMPIAN, DPMPSTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap. Hal ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha (nelayan) bahwa pentingnya legalitas suatu usaha dan menumbuhkan perilaku pelaku usaha (nelayan) yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan.
- e. Tim kerja JUM’AT IMPIAN akan menjadwalkan khusus di lokasi yang jauh dari ibukota kabupaten

Tahapan pelaksanaan inovasi JUM’AT IMPIAN di lapangan sebagai berikut :

- a. Tim kerja Jum’at Impian melakukan identifikasi data pelaku usaha (nelayan) di setiap kecamatan yang didapat baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan maupun dari HNSI Kabupaten Natuna;
- b. Tim kerja yang sudah dibentuk, bersiaga menyiapkan sarana yg dibutuhkan untuk merespon panggilan pelaku usaha (nelayan) ke lokasi usaha atau lokasi kelompok nelayan.

- c. Pelaku usaha (nelayan) menerima kedatangan tim kerja untuk membantu jenis pelayanan yang dibutuhkan
- d. Tim kerja akan memberikan pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi ataupun layanan lainnya yang diperlukan, kemudian selanjutnya tim bisa membantu menginput data pelaku usaha (nelayan) sesuai pertanyaan yang ada disistem, atau pelaku usaha (nelayan) dapat melakukan penginputan data secara mandiri
- e. Pengisian yang benar maka Aplikasi langsung menerbitkan izin usahanya
- f. Pelaku Usaha dapat mencetak langsung izin usaha tersebut.

Adapun tahapan dan jadwal inovasi pelayanan JUM'AT IMPIAN adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Inovasi

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan	Januari – Februari 2024
2	Koordinasi dan sinkronisasi	Maret 2024
3	Ujicoba	April – Mei 2024
4	Pelaksanaan	Juni – Desember 2024
5	Evaluasi	Juni – Desember 2024

3.2. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Inovasi JUM'AT IMPIAN merupakan inovasi pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak, sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Serangkaian kegiatan inovasi dari mulai perencanaan sampai evaluasi, ada keterlibatan pihak-pihak dengan tingkat intensitas yang berbeda. Berikut tingkat urgensi peran setiap stakeholders dalam inovasi pelayanan JUM'AT IMPIAN di DPMPSTSP Kabupaten Natuna.

Tabel 4. Formulasi Urgensitas Peran dalam Inovasi JUM'AT IMPIAN

Pemangku Kepentingan	Formulasi				Urgensitas Peran
	Perencanaan	Implementasi	Monev	Revisi Inovasi	
Internal DPMPTSP	v	v	v	v	Dominan
BARENLITBANGDA	v		v	v	Dominan
INSPEKTORAT			v	v	Dominan
Dinas Perikanan dan Kelautan	v	v	v	v	Dominan
HNSI Kab. Natuna		v	v		Sedang
Kelompok Nelayan		v	v		Sedang

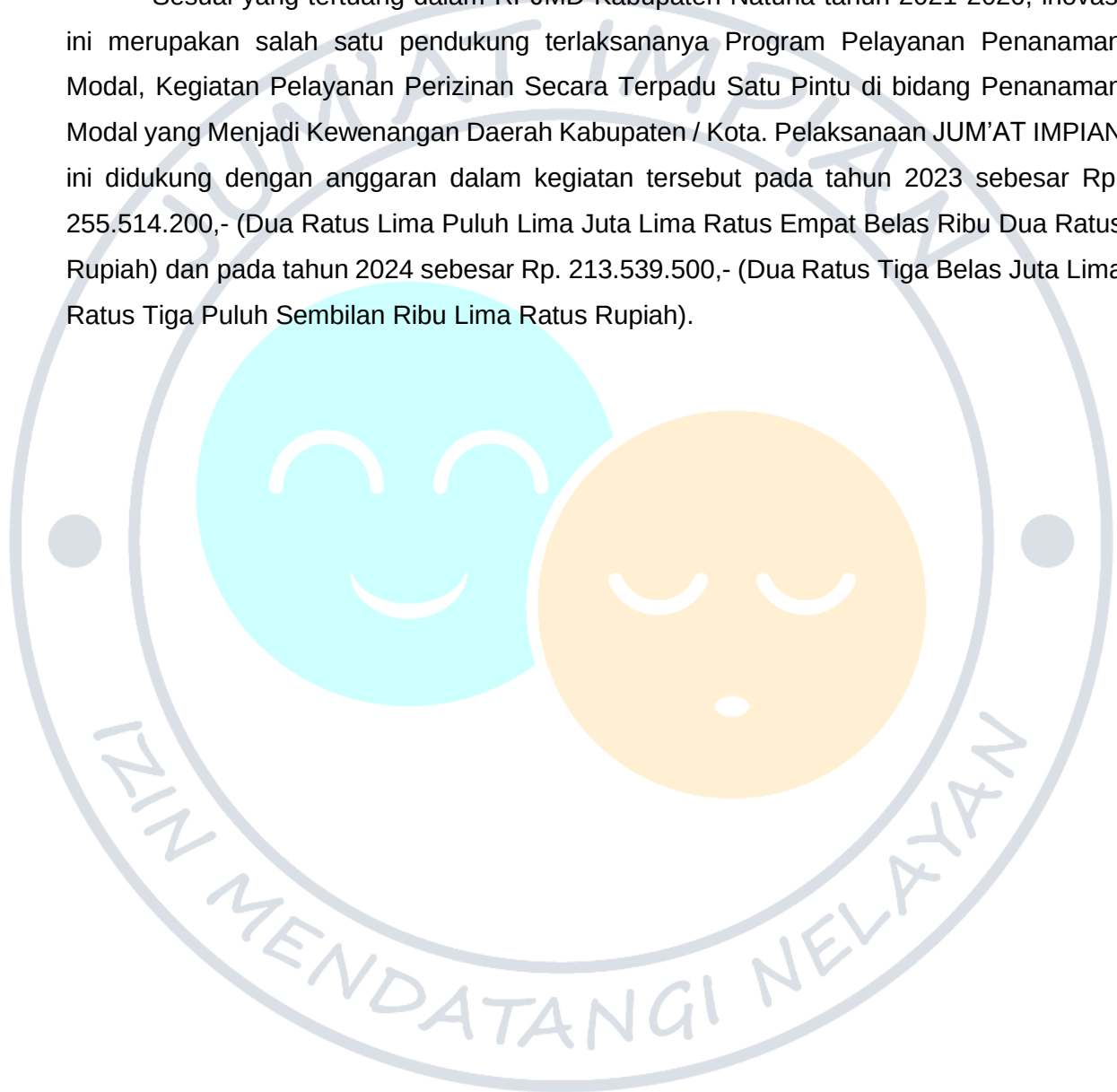
Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Inovator sebagai penggagas ide inovasi pelayanan publik
- b. Kepala DPMPTSP sebagai penetap ide peningkatan pelayanan publik sebagai inovasi
- c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator Inovasi dari setiap OPD
- d. Inspektorat sebagai OPD pengawas dan pengevaluasi pelaksanaan inovasi
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan yang memungkinkan untuk dilibatkan, Ketika memerlukan Data Sektor Perikanan dan pertimbangan teknis
- f. Ketua HNSI Kabupaten Natuna selaku Ketua Himpunan Nelayan yang ada di seluruh Kabupaten Natuna
- g. Ketua Kelompok Nelayan selaku ketua dari masing-masing jenis kelompok berdasarkan bidang usaha kelompok nelayan yang ada di setiap kecamatan
- h. JF Penata Perizinan sebagai penyusun bentuk inovasi beserta regulasinya sebagai suatu usulan rencana kebijakan pelayanan publik
- i. Pengelola Inovasi sebagai tim pelaksana inovasi
- j. Tim Siaga / Tim Kerja sebagai pelaksana kegiatan inovasi di lapangan
- k. Kecamatan, Desa / Kelurahan sebagai Tim Kerja / fasilitator pelaksana inovasi di wilayahnya.

- I. Kelompok Nelayan sebagai sasaran utama dari implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik.

3.3. ANGGARAN

Sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, inovasi ini merupakan salah satu pendukung terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Pelayanan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. Pelaksanaan JUM'AT IMPIAN ini didukung dengan anggaran dalam kegiatan tersebut pada tahun 2023 sebesar Rp. 255.514.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan pada tahun 2024 sebesar Rp. 213.539.500,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).



BAB IV

HASIL INOVASI DAERAH

4.1. URAIAN SINGKAT INOVASI

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti halnya inovasi JUM'AT IMPIAN dengan konsep pemberian layanan dengan cepat, mudah dan ekonomis. Tahapan pelaksanaan “JUM'AT IMPIAN” ini sudah diterapkan di beberapa kecamatan pada tahun 2023 dan 2024, yang disejalankan dengan pembinaan kepada para pelaku usaha (nelayan). Dan mendapat respon yang cukup baik dari para pelaku usaha (nelayan), karena dirasakan sangat membantu dan memudahkan dalam pengajuan ke dalam aplikasi yang lebih efektif dan efisien.

Dengan Inovasi JUM'AT IMPIAN, DPMPTSP siap menurunkan timnya untuk memberikan respon pelayanan yang cepat dan tanggap, memberikan penjelasan penginputan data ke dalam sistem OSS, ataupun layanan lainnya yang diperlukan, kemudian selanjutnya tim bisa membantu menginput data pelaku usaha (nelayan) sesuai pertanyaan yang ada di sistem, atau pelaku usaha (nelayan) dapat melakukan penginputan data secara mandiri, sehingga masyarakat / pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya secara mandiri. Hal ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha (nelayan) bahwa pentingnya legalitas suatu usaha dan menumbuhkan perilaku pelaku usaha (nelayan) yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan.

Berikut jumlah pelaku usaha yang menerima manfaat dari inovasi ini.

Tabel 5. Penerima manfaat inovasi

NO	Kecamatan	Jumlah	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Bunguran Timur	8	54
2.	Bunguran Timur Laut	1	2
3.	Bunguran Selatan	2	6
4.	Bunguran Barat	2	15
5.	Bunguran Utara	0	1
6.	Pulau Tiga	6	2
7.	Pulau Tiga Barat	0	39
8.	Pulau Laut	0	6
9.	Midai	0	45
10.	Suak Midai	0	2
11.	Serasan	0	4
12.	Serasan Timur	20	5
13.	Subi	0	11

14.	Batubi	0	9
15.	Seluan	0	5
Jumlah		39	206

Target perubahan dari inovasi JUM'AT IMPIAN ini adalah menyadarkan pelaku usaha (nelayan) bahwa pentingnya legalitas suatu usaha dan menumbuhkan perilaku pelaku usaha (nelayan) yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan perizinan usahanya dalam rangka mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang.

Di samping itu, manfaat lain dari inovasi ini adalah berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan Pelaku usaha (nelayan) untuk pergi ke ibukota kabupaten dalam mengurus perizinan usahanya, karena bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan internet yang pada umumnya sudah ada sampai kecamatan dan desa. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong minat pelaku usaha (nelayan) untuk mengurus perizinan di Kabupaten Natuna. Berikut gambaran manfaat dari sisi biaya.

Tabel 6. Gambaran perkiraan biaya dari masing-masing kecamatan ke Ibukota Kabupaten Natuna.

No	Kecamatan	Uraian	Biaya (Rp)	
			Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Biaya yang dikeluarkan PelakuUsaha				
1	Kecamatan Subi	Transfortasi Kapal Laut PP	186.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa kendaraan/ Honda	75.000	0
		Jumlah	661.000	0
2.	Kecamatan Serasan	Transfortasi Kapal Laut PP	322.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	797.000	0
3.	Kecamatan Serasan Timur	Transfortasi Kapal Laut PP	322.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0

		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75000	0
		Jumlah	797.000	0
4.	Kecamatan Midai	Transfortasi Kapal Laut PP	180.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	655.000	0
5.	Kecamatan Suak Midai	Transfortasi Kapal Laut PP	180.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	655.000	0
6.	Kecamatan Pulau Laut	Transfortasi Kapal Laut PP	200.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	140.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	715.000	0
7.	Kecamatan Pulau Seluan	Transfortasi Kapal Laut PP	250.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	725.000	0
8.	Kecamatan Pulau Panjang	Transfortasi Kapal Laut PP	186.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	661.000	0
9.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	Transfortasi Kapal Laut PP	140.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0

		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	615.000	0
10.	Kecamatan Pulau Tiga	Transfortasi Kapal Laut PP	186.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	100.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	661.000	0
11.	Kecamatan Bunguran Barat	Transfortasi Kapal Laut PP	150.000	0
		Transportasi Darat dari pelabuhan ke Kabupaten PP	60.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	605.000	0
12.	Kecamatan Bunguran Utara	Ongkos Mobil PP	150.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	525.000	0
13	Kecamatan Bunguran Batubi	Ongkos Mobil PP	150.000	0
		Biaya Penginapan/ malam	200.000	0
		Makan Per/Hari	100.000	0
		Sewa Kendaraan/Honda	75.000	0
		Jumlah	525.000	0

4.2. REPLIKASI

Inovasi JUM'AT IMPIAN sudah direplikasi.

BAB V PENUTUP

5.1. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Implementasi inovasi JUM'AT IMPIAN akan efektif apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya akan semakin jelas dirasakan masyarakat khususnya pelaku usaha sektor perikanan (nelayan). DPMPTSP berupaya untuk menjaga keberlanjutan inovasi JUM'AT IMPIAN ini, dengan melihat beberapa aspek berikut :

- a. **Aspek Sosial.** Inovasi ini akan membangun komunikasi lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha (nelayan), sehingga pelaku usaha (nelayan) merasa puas dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
- b. **Aspek Ekonomi.** Inovasi ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pelaku usaha (nelayan), karena mereka merasa terlindungi secara hukum, selain itu dengan inovasi ini pelaku usaha (nelayan) tidak mengeluarkan biaya operasional, hal ini dapat menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

DPMPTSP berupaya agar inovasi yang dapat memberikan pelayanan prima tetap dapat dilaksanakan, salah satunya dengan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik (Permendagri nomor 138 Tahun 2017), dan mengikutsertakan para petugas dalam pelatihan- pelatihan/BIMTEK. Oleh karena itu, DPMPTSP menunjuk tim pengelola inovasi setiap tahun sebagai penanggung jawab pelaksana inovasi JUM'AT IMPIAN (terlampir).

5.2. EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan inovasi JUM'AT IMPIAN, DPMPTSP melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasinya, disamping itu juga ada beberapa penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dan Kementerian PAN & RB .

Demikianlah proposal inovasi pelayanan publik JUM'AT IMPIAN ini kami sampaikan, semoga dapat kiranya diangkat menjadi salah satu inovasi daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Kami menyadari bahwa proposal yang kami susun ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan investasi di Kabupaten Natuna.

Pada akhirnya kepada Allah SWT kami memohon agar kiranya kita semua diberikan petunjuk dalam menjalankan tugas yang diamanahkan, serta Kabupaten Natuna yang kita cintai ini semakin maju dan selalu diberikan keberkahan aamiin.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna**



AHMAD SOFIAN, SE, M. Si
NIP. 19770731 200604 1 020

